GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**: Koran Tempo**	**Tgl/Bln/Thn**	**: 29 Agustus 2007**
Subyek	**: Ganti Rugi Lapindo**	**Hari**	**: Rabu**
		Halaman	**: A4**

Medio 2008, Lapindo Harus Selesaikan Ganti Rugi

DPR minta jaminan Lapindo mengganti kerugian negara dan masyarakat.

JAKARTA -- Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah memperoleh jaminan Lapindo Brantas Inc. yang mengikat dalam menyelesaikan tanggung jawab atas semburan lumpur di Sidoarjo. Jaminan itu berupa kesediaan Lapindo mengganti kerugian masyarakat, negara, dan dampak sosialnya."Panitia Anggaran menyetujui anggaran infrastruktur karena terkait dengan perekonomian Jawa Timur. Namun, perusahaan pembuat bencana tidak bisa lepas tanggung jawab," kata Ketua Panitia Anggaran Emir Moeis seusai sidang paripurna di gedung MPR/DPR, Jakarta, kemarin. Menurut Emir, pemerintah mengalokasikan Rp 600 miliar untuk infrastruktur yang rusak akibat semburan lumpur Lapindo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2007. Jaminan tersebut, kata dia, bukan berupa uang. Tapi pemerintah harus memperoleh kepastian Lapindo bisa mengganti alokasi APBN. "Pemerintah harus menunjukkan kewibawaan," katanya. Pemerintah juga harus mengawasi secara ketat penyelesaian masalah semburan lumpur Lapindo ini. Keputusan presiden harus berfungsi secara optimal. "Pemerintah bisa kena *class action* dari masyarakat karena tidak mengawasi Lapindo," katanya. Emir mengatakan Lapindo harus selesai mengganti 20 persen dari total kerugian warga sebelum Idul Fitri mendatang. Sisanya dilunasi sebelum Idul Fitri setahun kemudian. "Itu merupakan hasil pembicaraan antara Komisi Keuangan DPR dan Menteri Keuangan," ujarnya.

Anggota Komisi Keuangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPR, Dradjad Hari Wibowo, mengatakan DPR tak mengatur jaminan Lapindo membayar APBN. Bentuk jaminan disepakati antara pemerintah dan Lapindo. "Jangan sampai APBN sudah keluar tapi tidak bisa ditagih," katanya. Seorang pengusul interpelasi Lapindo dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Abdullah Azwar Anas, mengatakan ganti rugi masyarakat harus segera tuntas. Fraksinya tidak mengusulkan mekanisme penjaminan Lapindo membayar duit negara. "Itu terserah Panitia Anggaran dan pemerintah," katanya. Senin malam lalu, pemerintah membatasi waktu penyelesaian ganti tanah dan bangunan korban lumpur Lapindo pada pertengahan tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dalam pertemuan terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta menteri segera menyelesaikan dampak lumpur Lapindo Sidoarjo.Kepada Menteri Sosial dan Menteri Pekerjaan Umum, kata Sri Mulyani, Presiden minta penyelesaian 20 persen penggantian tanah dan bangunan sebelum Lebaran tahun ini. Sedangkan 80 persen sisanya rampung dalam jangka waktu dua tahun sebelum penggantian biaya sewa habis, yakni pertengahan 2008.

"Presiden menginstruksikan agar menteri terkait yang menangani bisa menyampaikan kepada pihak swasta yang bertanggung jawab supaya melaksanakan kewajibannya," kata Sri Mulyani dalam rapat Panitia Anggaran DPR. **Kurniasih Budi | AGOENG WIJAYA**